

Rapat Koordinasi Money dan Satlak



Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

Bulan April 2008

Kamis, 17 April 2008

Aula Soehoed Warnaen Lt. 3 Bapeda Provinsi Jawa Barat

Jalan Ir. H. Djuanda No. 287

BANDUNG

AGENDA RAPAT KOORDINASI

- Persiapan Pelaksanaan TA 2008
- Hasil Audit Bawasda Provinsi Jawa Barat



LAPORAN PEMENUHAN KEWAJIBAN

Satlak dan Tim Monev PPK IPM Kabupaten/Kota

Tim Monev (paling lambat tanggal 5 setiap bulan)

- Laporan monev (bulanan/caturwulan/akhir tahun)
- Rencana kegiatan
- Rekomendasi

Tidak ada Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan tepat waktu bulan April 2008

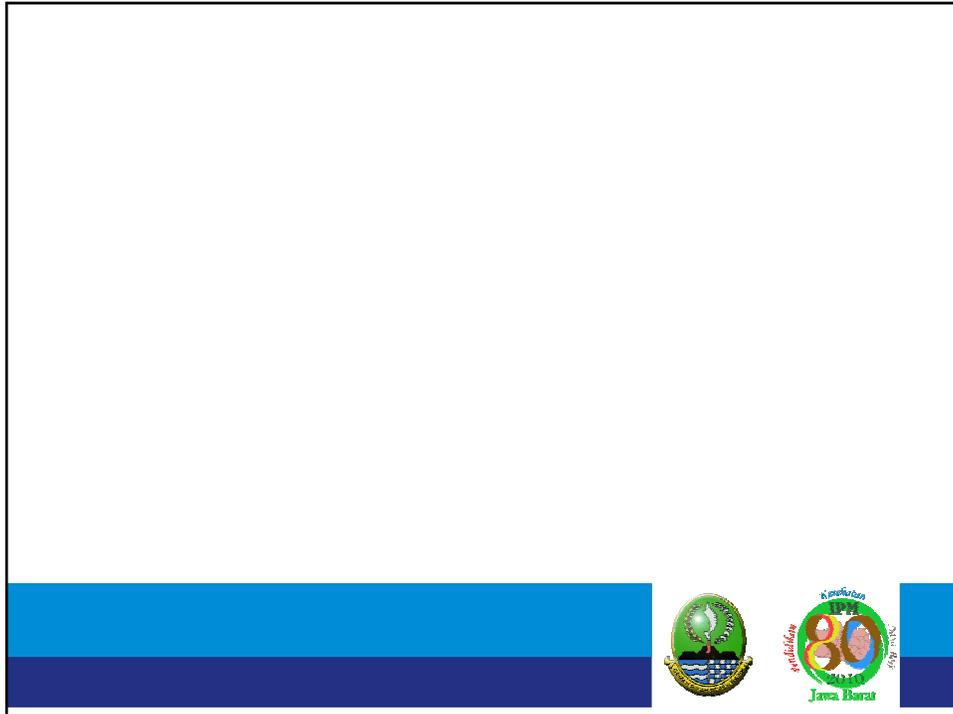


INVENTARISIR ASET

Kabupaten/Kota yang menyampaikan Rekapitulasi Pengelolaan inventarisasi aset (belanja modal/stimulan uang dan barang) sesuai dengan format terakhir adalah :

- Kabupaten Bandung
- Kabupaten Kuningan
- Kabupaten Karawang
- Kota Depok
- Kota Bekasi
- Kabupaten Sumedang

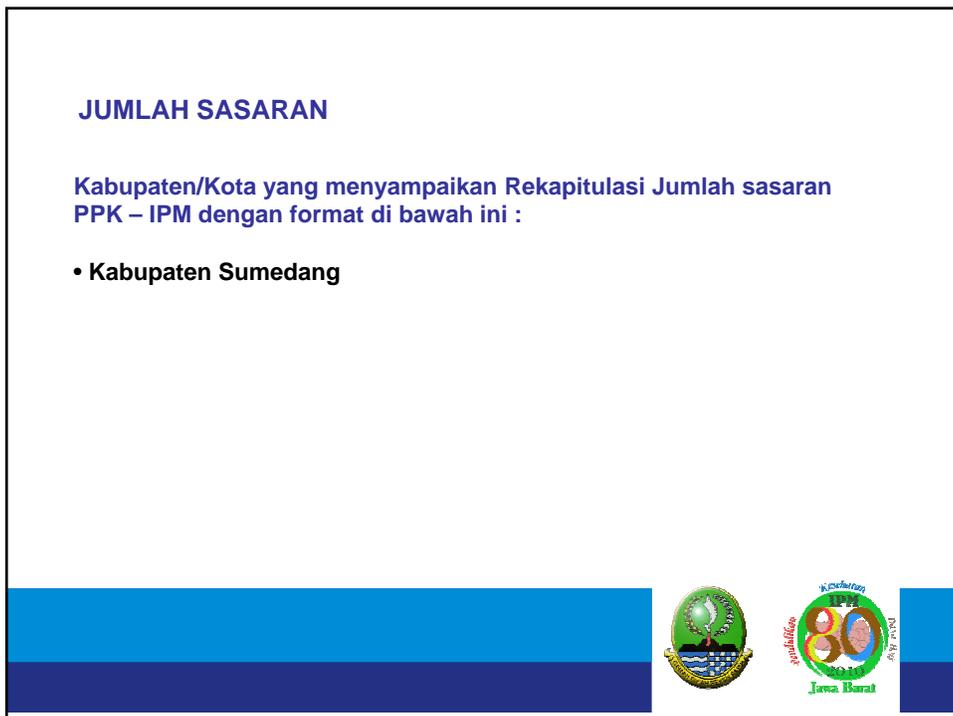




JUMLAH SASARAN

Kabupaten/Kota yang menyampaikan Rekapitulasi Jumlah sasaran PPK – IPM dengan format di bawah ini :

- Kabupaten Sumedang



**JUMLAH SASARAN PPK-IPM KAB./KOTA.....
TAHUN ANGGARAN*)**

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN DALAM DA/DP	LOKASI	JUMLAH SASARAN	KETERANGAN
1	PENDIDIKAN							
2	KESEHATAN							
3	DAYA BELI							

*) Tahun Anggaran 2006 dan 2007 untuk batch I
Tahun Anggaran 2007 untuk batch II

mengetahui :
Ketua Satlak PPK IPM Kab./Kota

....., 2008

Ketua Tim Money,



Satlak PPK-IPM Kabupaten/Kota (paling lambat tanggal 10 setiap bulan)

- *Database* dinamis program dan kegiatan *updating* tiap bulan
- Rencana kegiatan
- Laporan pelaksanaan kegiatan bulanan/caturwulan/akhir tahun
- Rekapitulasi SPJ
- Rekapitulasi fisik dan keuangan

yang menyampaikan laporan tepat waktu bulan April 2008:

- Kabupaten Kuningan
- Kabupaten Indramayu
- Kabupaten Depok
- Kabupaten Ciamis



Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan dokumen :

- PBP/PAP
- Road map
- Dokumen Pelaksanaan (DP) 2008
- Jadwal kegiatan
- Rencana operasional kegiatan (ROK)
- Juklak/juknis

Adalah :

- Kota Bekasi
- Kabupaten Kuningan
- Kabupaten Karawang
- Kota Depok
- Kabupaten Sumedang



Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan dokumen :

- SPP Tahap I

Adalah :

- Kabupaten Sukabumi : Tanggal 11 April 2008 sudah Transfer ke Kas Daerah
- Kabupaten Sumedang, Kuningan, Karawang : Tanggal 16 April 2008 sudah masuk ke Kas Provinsi
- Kota Bekasi dengan Kota Depok sudah tahap SPP dalam tahap SP2D



Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan buku survey IPM adalah :

Batch I

- Kota Tasikmalaya
- Kota Ciamis
- Kabupaten Cianjur
- Kabupaten Tasikmalaya
- Kabupaten Subang
- Kota Cirebon
- Kabupaten Bandung

Batch II

- Kota Depok
- Kabupaten Sukabumi
- Kota Bekasi
- Kabupaten Karawang
- Kabupaten Kuningan



Tim Tenaga Ahli (paling lambat tanggal 10 setiap bulan)

- Laporan money bulanan/caturwulan/akhir tahun
- Rencana kegiatan
- Rekomendasi

yang menyampaikan laporan tepat waktu bulan April 2008:

- Kabupaten Kuningan
- Kabupaten Karawang



• Rekapitulasi Realisasi Keuangan dan Fisik s/d Akhir Bulan Desember 2007

REALISASI KEUANGAN DAN FISIK SD BULAN DESEMBER 2007

NO	KABUPATEN/ KOTA	TOTAL ANGGARAN FINAL	SP2D	REALISASI			ANGGARAN YANG TIDAK DISERAP SD AKHIR TA. 2007	
				KEUANGAN (SPJ)		FISIK KEGIATAN	PROVINSI	APBD II
				(Rp.)	(%)	(%)		
1	Kota Sukabumi	Rp 22.500.000.000	Rp 22.323.663.000	Rp 19.500.465.663	86.67	93.35	Rp 176.337.000	Rp 2.823.197.337
2	Kota Cirebon	Rp 23.336.181.300	Rp 21.741.000.300	Rp 18.977.670.015	81.32	87.89	Rp 1.595.181.000	Rp 2.763.330.285
3	Kab. Ciamis	Rp 22.500.000.000	Rp 22.452.917.200	Rp 22.171.242.245	98.54	98.54	Rp 47.082.800	Rp 281.674.955
4	Kota Tasikmalaya	Rp 16.185.190.225	Rp 16.185.190.225	Rp 13.787.482.420	85.19	86.14	-	Rp 2.397.707.805
5	Kota Bandung	Rp 16.621.514.500	Rp 16.426.539.500	Rp 15.343.092.512	92.31	96.04	Rp 194.975.000	Rp 1.083.446.988
6	Kab. Subang	Rp 18.592.087.300	Rp 18.312.477.300	Rp 16.300.425.544	87.67	87.78	Rp 279.610.000	Rp 2.012.051.756
7	Kab. Tasikmalaya	Rp 19.000.000.000	Rp 19.000.000.000	Rp 18.575.269.192	97.76	99.49	-	Rp 424.730.808
8	Kab. Cianjur	Rp 18.000.000.000	Rp 17.913.755.000	Rp 17.532.516.050	97.40	90.21	Rp 86.245.000	Rp 381.238.950
9	Kab. Indramayu	Rp 14.941.358.800	Rp 14.941.358.800	Rp 13.742.349.450	91.98	94.90	-	Rp 1.199.009.350
10	Kota Bekasi	Rp 24.627.661.975	Rp 20.613.256.975	Rp 12.610.303.286	51.20	78.00	Rp 4.014.605.000	Rp 8.002.953.689
11	Kota Depok	Rp 25.000.000.000	Rp 24.648.680.000	Rp 21.787.643.000	87.15	98.59	Rp 351.320.000	Rp 2.861.037.000
12	Kab. Sukabumi	Rp 19.961.183.500	Rp 19.613.545.750	Rp 17.774.385.450	89.04	93.65	Rp 347.637.750	Rp 1.839.160.300
13	Kab. Kuningan	Rp 19.974.939.550	Rp 19.943.439.550	Rp 19.258.101.840	96.41	99.43	Rp 31.500.000	Rp 685.337.710
14	Kab. Sumedang	Rp 20.000.000.000	Rp 18.851.018.450	Rp 15.804.445.350	79.02	69.19	Rp 1.148.981.550	Rp 3.046.573.100
15	Kab. Karawang	Rp 14.506.049.400	Rp 14.330.899.400	Rp 12.733.621.940	87.78	88.00	Rp 175.150.000	Rp 1.597.277.460
	Jumlah	Rp 295.746.366.550	Rp 287.297.741.450	Rp 255.899.013.957	87.30	90.75	Rp 8.448.625.100	Rp 31.398.727.493



• Rekapitulasi hasil costing untuk Batch II

HASIL COSTING PPK-IPM TERHADAP USULAN 6 KAB/KOTA BATCH II

NO	KABUPATEN/KOTA	PLAFOND ANGGARAN	PPK-PROVINSI		APBN	APBD II		STAKEHOLDERS
			Usulan	Hasil Costing		Murni	Luncuran th 2007	
KLUSTER I								
1	KOTA DEPOK	23.750.000.000	23.749.997.430	23.750.000.000	-	2.897.256.200	2.861.037.000	1.245.666.000
2	KOTA BEKASI	22.500.000.000	22.121.192.600	22.334.915.200	-	1.244.989.730	6.736.043.500	392.000.000
KLUSTER II								
1	KAB. SUKABUMI	19.000.000.000	18.699.882.400	18.981.518.750	521.750.000	2.915.090.000	1.803.599.300	2.198.235.000
2	KAB. KUNINGAN	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	-	1.000.000.000	846.322.500	1.407.610.000
3	KAB. SUMEDANG	19.000.000.000	19.000.000.000	18.653.212.000	-	950.000.000	3.497.133.600	615.212.900
KLUSTER III								
1	KAB. KARAWANG	14.250.000.000	14.250.000.000	14.249.797.500	-	1.000.000.000	1.604.636.974	3.337.800.000
	JUMLAH	118.500.000.000	117.821.072.430	117.969.443.450	521.750.000	10.007.335.930	17.348.772.874	9.196.523.900
								JML NON PPK



KOMITMEN DANA APBD II UNTUK KEBERLANJUTAN PPK-IPM TAHUN ANGGARAN 2008 KAB/KOTA BATCH. I

NO	KABUPATEN/KOTA	MANAJEMEN SATLAK	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	KLUSTER I			
1	KOTA CIREBON	Rp 210.000.000,00	Rp 7.369.614.550	Rp 7.579.614.550,00
2	KOTA SUKABUMI	Rp 440.175.023,00	Rp 463.824.977,00	Rp 904.000.000,00
3	KAB. CIAMIS	Rp 500.000.000	Rp 8.986.919.139	Rp 9.486.919.139,00
	KLUSTER II			
1	KAB. TASIKMALAYA	Rp 500.000.000	Rp 7.433.800.000	Rp 7.933.800.000,00
2	KAB. BANDUNG	Rp 500.000.000	Rp 6.780.970.000	Rp 7.280.970.000,00
3	KAB. CIANJUR	Rp 800.000.000	Rp 10.000.000.000	Rp 10.800.000.000,00
4	KOTA TASIKMALAYA	Rp 200.000.000	Rp 3.200.080.000	Rp 3.400.080.000,00
5	KAB. SUBANG	Rp 427.220.526	-	Rp 427.220.526,00
	KLUSTER III			
1	KAB. INDRAMAYU	Rp 5.991.000.000,00	Rp 9.641.405.700	Rp 15.632.405.700,00
	JUMLAH	Rp 9.568.395.549,00	Rp 53.876.614.366,00	Rp 63.445.009.915,00



Untuk Menjadi Perhatian

Kepada Yth.

1. Satlak Kabupaten/Kota (tiap tanggal 10)
 2. Tim Money Kabupaten/Kota (tiap tanggal 5)
 3. Tenaga Ahli (tiap tanggal 10)
- dimohon untuk menyampaikan laporan tiap bulannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Gubernur



Untuk Menjadi Perhatian

Untuk meminimumkan Penyebaran virus,
bahan – bahan paparan telah dikirim ke
email aktif masing – masing contact
person 15 kabupaten/kota
dan dapat dilihat melalui
ppkipmjabar.wordpress.com



Ringkasan Hasil Audit Bawasda di
Kab/Kota Penerima Dana PPK-IPM

I. Pengadaan Barang dan Jasa:

Hasil review Bawasda

- Kurangnya pemahaman dan penguasaan PJP, PPTK, Bendahara, Panitia Pengadaan Barang / Jasa serta Tim Pemeriksa Barang /Jasa terhadap Kepres no. 80, sehingga terjadi beberapa hal sbb:
 - PJP/KPA tidak menunjuk/menetapkan pejabat/panitia pengadaan barang/jasa dan panitia pemeriksa barang/jasa.
 - Perjanjian tidak tandatangani oleh PJP selaku KPA melainkan oleh PPTK.
 - Paket barang/jasa pelelangan umum dilakukan secara penunjukan langsung dengan pemecahan paket.
 - Kurang cermatnya penyusunan HPS sehingga tidak tersedia acuan dalam menilai kewajaran harga penawaran, menetapkan nilai jaminan pelaksanaan, dan negosiasi harga dll.
 - Kurang rincinya pembuatan KAK.

Rekomendasi Bawasda untuk Ketua Satlak Kab/kota agar:

- Membenahi kinerja internal seluruh jajaran Satlak PPK-IPM, Tim Monev termasuk Tenaga Ahli Penuh Waktu, Panitia Pengadaan Barang/Jasa serta Tim Pemeriksa Barang/jasa terutama terhadap ketentuan peraturan Kepres No. 80 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa.
- Menindaklanjuti dengan segera semua hasil temuan Bawasda Provinsi Jawa Barat untuk optimalisasi pelaksanaan akselerasi peningkatan IPM di Kab/Kota sehingga mampu mendongkrak capaian target IPM pada tahun 2008.
- Melakukan pengawasan internal secara berkala baik mingguan ataupun bulanan kepada PJP, PPTK, Bendahara, Tenaga Ahli dan Tim Monev melalui rapat koordinasi internal Satlak Kab/Kota untuk memantau pelaksanaan PPK-IPM di Kab/Kota masing-masing.

I. Pengadaan Barang dan Jasa:

Hasil review Bawasda

- Lemahnya pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa sehingga terjadi:
 - Perbedaan spesifikasi barang antara dokumen kontrak dengan realisasi yang berdampak pada tidak tercapainya output program dan kegiatan PPK-IPM di Kab/Kota.
 - Kelebihan pembayaran kepada pihak penyedia barang/jasa.
 - Tidak lengkapnya persyaratan administrasi pihak penyedia barang/jasa seperti Surat Referensi Keterangan Bank, Keterangan kompetensi dan kualifikasi perusahaan, kartu tanda anggota biasa dari Kadin yang habis masa berlakunya, serta tidak dilampirkannya bukti-bukti pajak dan Fakta Integritas.

Rekomendasi Bawasda untuk Ketua Satlak Kab/kota agar:

- Membenahi kinerja internal seluruh jajaran Satlak PPK-IPM, Tim Monev termasuk Tenaga Ahli Penuh Waktu, Panitia Pengadaan Barang/Jasa serta Tim Pemeriksa Barang/jasa terutama terhadap ketentuan peraturan Kepres No. 80 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa.
- Menindaklanjuti dengan segera semua hasil temuan Bawasda Provinsi Jawa Barat untuk optimalisasi pelaksanaan akselerasi peningkatan IPM di Kab/Kota sehingga mampu mendongkrak capaian target IPM pada tahun 2008.
- Melakukan pengawasan internal secara berkala baik mingguan ataupun bulanan kepada PJP, PPTK, Bendahara, Tenaga Ahli dan Tim Monev melalui rapat koordinasi internal Satlak Kab/Kota untuk memantau pelaksanaan PPK-IPM di Kab/Kota masing-masing.

II. Administrasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan:

Hasil review Bawasda

- Kurangnya pemahaman dan penguasaan PJP, PPTK dan Bendaharawan terhadap: Pergub No. 5 Tahun 2007 khususnya tentang Standar Biaya Belanja (Pasal 17) dan ketentuan Ketua Satlak PPK-IPM Provinsi Jawa Barat No. 900/Kep.179-Dalprog/2007 dan perubahannya tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban PPK-IPM oleh PJP, PPTK dan Bendahara sehingga mengakibatkan terdapat temuan administratif. Contoh:
 - adanya kelebihan pembayaran terhadap honor yang tidak sesuai dengan Keputusan Bupati/Walikota.
 - tidak ditandatanganinya bukti SPJ pembayaran oleh PJP serta tidak dilengkapinya Surat Keputusan.
 - belum adanya dokumen Berita Acara Serah Terima Barang dari PJP kepada Kelompok Sasaran.
 - tidak lengkapnya register giro/cek, SPJ dan buku-buku pembantu (Buku Bank, Buku Panjar dll).

II. Administrasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan:

Hasil review Bawasda

- Kurangnya kedisiplinan para PJP, PPTK dan Bendahara dalam menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban keuangan bulanan sesuai Pergub sehingga mengakibatkan terlambatnya pelaporan ke Satlak PPK-IPM Provinsi.
- Perguliran stimulan uang yang dilakukan melalui mekanisme perbankan/lembaga keuangan pada tahun 2007 belum sepenuhnya terserap oleh kelompok sasaran karena persyaratan administrasi.

Rekomendasi dari Bawasda untuk Ketua Satlak Kab/Kota

- Membenahi kinerja internal seluruh jajaran Satlak PPK-IPM, Tim Monev termasuk Tenaga Ahli Penuh Waktu, Panitia Pengadaan Barang/Jasa serta Tim Pemeriksa Barang/Jasa terutama terhadap ketentuan peraturan Pergub No. 5 Tahun 2007 dan Perubahannya .
- Membenahi kinerja internal seluruh jajaran Satlak PPK-IPM, Tim Monev termasuk Tenaga Ahli Penuh Waktu, Panitia Pengadaan Barang/Jasa serta Tim Pemeriksa Barang/Jasa terutama terhadap ketentuan peraturan Keputusan Ketua Satlak PPK-IPM Provinsi Jawa Barat Nomor : **900/Kep.179-Dalprog/2007** dan perubahannya tentang Penatausahaan dan

III. Monitoring dan Evaluasi: Hasil Review Bawasda

- Lemahnya kendali tim monev kab/kota dalam:
 - memonitor kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi program (terutama pengelolaan aset). Contoh PJP dan PPTK tidak mengetahui perkembangan perguliran stimulan barang dan uang, belum terpasangnya stimulan barang misalnya unit jamban keluarga, unit sarana air bersih, tidak berfungsinya mesin pabrikasi serta kelebihan distribusi buku pelajaran dan rapor kepada kelompok sasaran pada bidang pendidikan.
 - memberikan rekomendasi kepada PJP dan PPTK sehingga tidak ada sanksi tegas terhadap penyimpangan di lapangan.
 - mengontrol dan memantau pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Tidak optimalnya kinerja Tim Monev Kab/Kota karena personil memiliki kesibukan tinggi pada instansinya masing-masing.

Rekomendasi dari Bawasda untuk Bupati/Walikota dan Ketua Tim Monev

- Melaksanakan konsolidasi, membenahi serta merevitalisasi kinerja internal seluruh Tim Monev untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai Tim Sukses pelaksanaan PPK-IPM di Kab./Kota masing-masing sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2007 dan perubahannya terutama ayat 5 pasal 31 tentang fungsi Tim Monev Kab/Kota.
- Tim Monev lebih diperankan secara aktif untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan PPK-IPM untuk meningkatkan capaian target IPM Kab/Kota yang bersangkutan sehingga memiliki dampak yang signifikan dalam memberikan kontribusi peningkatan IPM Provinsi Jawa Barat.
- Tim Monev agar dilibatkan dalam memantau semua dari mulai proses pengadaan barang dan jasa sampai fungsionalnya stimulan barang yang diterima oleh kelompok sasaran.